



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

4.01.0.00.0.00.01.0008

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi yang dilaksanakan oleh bagian-bagian kerja dalam Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan setiap tahunnya dituangkan dalam RENJA Perubahan Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan.

RENJA Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si pada bulan November 2020 sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Terbaik Tingkat Nasional. Penyusunan RENJA Perubahan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/ti Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Banjarbaru, 3 Juli 2023

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740310 199003 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi RENJA Perubahan Sampai Triwulan II Tahun 2023	6
2.2 Analisis Kinerja BPBJ dan SETDA KALSEL	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	23
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	23
BAB IV PENUTUP	26



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Hasil Kerja Perangkat Daerah Triwulan II	8
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	12
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023.....	24



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RENSTRA 2016-2021 dan pedoman yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dokumen perencanaan apabila berubah maka perlu dibuat kembali Rancangan Renja Perubahan Renja sesuai apa yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dibawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang/jasa. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;



- b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan barang dan jasa serta tata usaha biro

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi Dan/Atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Sub Bagian Tata Usaha

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
16. Peraturan Pemerintaah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517) ;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005



- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 090 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 26. Pergub no. 033 tahun 2021 tanggal 12 agustus 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



- BAB I. PENDAHULUAN**
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**
Berisi uraian evaluasi Renja sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, analisa kinerja, isu-isu penting tugas dan fungsi SKPD
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Berisi uraian tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah serta program dan kegiatan serta pendanaan program dan kegiatan
- BAB IV. PENUTUP**



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 **BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA** **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** **TAHUN 2023**

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini merupakan penjabaran RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021- 2026.

Pada Tahun 2023, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa



- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2.2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik
 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2.3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa



Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaa Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan (TW II 2023)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (2022)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II 2023)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD (%)		Realisasi kinerja & anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja & realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		12	13
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap layanan kesekretariatan	100 Point	1,072,847,096	100 Point	1,072,847,096	100 Point	1,717,621,800	50.93	622,968,489	50.93	36%	150.93	1,695,815,585	150.93%	158%	Biro PBJ	
1.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	11,321,036	100%	11,321,036	100%	6,795,000	50%	3,264,000	50	48%	150%	14,585,036	150%	129%	Biro PBJ	
1.1.1	4.01.01.1.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	12 dok	11,321,036	12 dok	11,321,036	2 dok	6,795,000	1 Dok	3,264,000	50	48%	13 dok	14,585,036	108.33%	129%	Biro PBJ	
1.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	19,540,698	100%	19,540,698	100%	7,818,900	50%	7,041,676	50	90%	150%	26,582,374	150%	136%	Biro PBJ	
1.2.1	4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dok	19,540,698	1 dok	19,540,698	12 dok	7,818,900	6 Dok	7,041,676	50	90%	7 dok	26,582,374	100%	136%	Biro PBJ	
1.3	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	33,750,000	100%	33,750,000	100%	32,400,000	50%	14,400,000	50	44%	150%	48,150,000	150%	143%	Biro PBJ	
1.3.1	4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	116 stell	33,750,000	116 stell	33,750,000	120 stell	32,400,000	60 stell	14,400,000	50	44%	176 stell	48,150,000	151.72%	143%	Biro PBJ	
1.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	231,389,578	100%	231,389,578	100%	311,807,900	56.66%	176,102,728	56.66	56%	100%	407,492,306	100%	176%	Biro PBJ	
1.4.1	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	11,608,150	12 bulan	11,608,150	752 L	11,513,000	555 L	7,398,743	73.8	64%	100%	19,006,893	100%	164%	Biro PBJ	
1.4.2	4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dok	219,781,428	1 dok	219,781,428	12 dok	300,294,900	6 Dok	168,703,985	50	56%	7 dok	388,485,413	100%	177%	Biro PBJ	
1.5	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	176,382,000	100%	176,382,000	100%	16,000,000	0%	0	0	0	10	176,382,000	100%	100%	Biro PBJ	
1.5.1	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10 unit	176,382,000	10 unit	176,382,000	1 unit	16,000,000	0 unit	0	0	0	10	176,382,000	100%	100%	Biro PBJ	
1.6	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya airdan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	600,463,784	100%	600,463,784	100%	1,342,800,000	50%	422,160,085	u	31%	100%	1,022,623,869	100%	170%	Biro PBJ	
1.6.1	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 bulan	600,463,784	12 bulan	600,463,784	12 bulan	1,342,800,000	6 bulan	422,160,085	50	31%	18 bulan	1,022,623,869	100%	170%	Biro PBJ	
2		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. PREDIKAT INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2. NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3. RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	0 99.75 54.38%	2,868,392,700	0 99.75 54.38%	2,868,392,700	75 Baik 87 25%	2,898,898,819	79.1 99.81 12.5%	1,316,333,837	100% 100% 50%	45% 99.81 66.88	79.1 99.81 66.88	4,184,726,537	79.1 100% 122.98%	146% 100% 122.98%	Biro PBJ	
2.1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100% 100%	767,006,324	100% 100%	767,006,324	100% 100%	679,609,700	25% 25%	365,018,998	25% 25%	54% 125%	125% 125%	1,132,025,322	125% 125%	148% 125%	Biro PBJ	



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN 2023)

2.1.1		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa 2. Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	12 Lap 100%	278,832,906	12 Lap 100%	278,832,906	2 Lap 100%	253,487,500	1 Lap 50%	86,518,585	50%	34%	13 Lap 150%	365,351,491	108.33% 150%	131%	Biro PBJ	
2.1.2		Pelaksanaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Lap	259,321,452	12 Lap	259,321,452	12 Lap	219,961,000	6 Lap	137,926,387	50%	63%	18 Lap	397,247,839	150%	153%	Biro PBJ	
2.1.3		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan PBJ tepat waktu	12 lap 100%	228,851,966	12 lap 100%	228,851,966	12 Lap 100%	206,161,200	6 Lap 25.97%	140,574,026	50% 25.97%	68%	18 Lap 100%	369,425,992	150% 100%	161%	Biro PBJ	
2.2		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% 0.8	1,030,251,804	100% 0.8	1,030,251,804	100% 0.8	959,199,100	60% 0.8	446,991,733	60% 100%	46.60%	160% 100%	1,477,243,537	160% 100%	143%	Biro PBJ	
2.2.1		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1. Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik 2. Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput di SIRUP tepat waktu 3. Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/unit kerja/penyedia/pokja di lingkup provinsi kalimantan selatan	12 Lap 100% 100%	479,951,522	12 Lap 100% 100%	479,951,522	12 Lap 100% 100%	329,060,000	6 Lap 100% 3.80%	134,259,882	50% 100% 3.8%	40.80%	18 Lap 100%	614,211,404	150% 100% 100%	127.97%	Biro PBJ	
2.2.2		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Lap	322,325,616	12 Lap	322,325,616	12 Lap	355,796,100	6 Lap	171,383,431	50%	48.17%	18 Lap	493,709,047	150%	153%	Biro PBJ	
2.2.3		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Lap	227,974,666	12 Lap	227,974,666	12 Lap	274,343,000	6 Lap	141,348,420	50%	51.52%	18 Lap	369,323,086	150%	162%	Biro PBJ	
2.3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ 2. Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro 3. Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	50% 100% 17% 100%	1,071,134,572	50% 100% 17% 100%	1,071,134,572	57.14% 100% 18.18% 100%	1,260,090,019	48.84% 50% 18.18% 50%	504,323,106	85.47% 50% 100% 50%	40%	98.84% 150% 35.18% 150%	1,575,457,678	100% 100% 100% 100%	147%	Biro PBJ	
2.3.1		Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	20 org	380,345,581	20 org	380,345,581	25 orang	566,522,200	21 orang	284,218,574	84%	50%	41 orang	664,564,155	100%	175%	Biro PBJ	
2.3.2		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	306,492,501	12 dok	306,492,501	12 dok	285,254,700	6 dok	97,824,312	50%	34%	18 dok	404,316,813	150%	132%	Biro PBJ	



2.3.3		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa 2. Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik) 3. Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	12 dok 55% 100%	384,296,490	12 dok 55% 100%	384,296,490	12 dok 60% 100%	408,313,119	6 dok 59% 100%	122,280,220	50% 98.33% 100%	30% 	18 dok 114% 100%	506,576,710	150% 114% 100%	132%	Biro PBJ	
-------	--	---	---	-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------	------------------------------	------	----------	--



2.2. Analisa Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Secara umum Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai dengan hasil-hasil yang telah ditentukan. Adapun penjabaran capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2

TARGET DAN PENCAPAIAN KINERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisa	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	Indeks Kepuasan Terhadap layanan kesekretariatan	100 Point	100 Point	100 Point	100 Point	100 Point		
1.1	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	-	100%		
1.1.1	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	12 dok	2 dok	8 dok	-	12 dok		
1.2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	100%		
1.2.1	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dok	12 dok	8 dok	-	1 dok		
1.3	Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	100%	-	100%		
1.3.1	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	116 stell	120 stell	240 stell	-	116 stell		
1.4	Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	-	100%		
1.4.1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	752 L	1000 L	12 Bulan	12 bulan		
1.4.2	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dok	12 dok	12 dok	3 Dokumen	1 dok		
1.5	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%		
1.5.1	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	1 unit	64 unit/buah	12 Bulan	10 unit		
1.6	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	100%	100%	100%	100%		



1.6.1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan		
2	1. PREDIKAT INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2. NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3. RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	0	75 Baik	75 Baik	0	0		
		85	87	87	99.65	99.75		
		25%	25%	25%	0	54.38%		
2.1	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100%	100%	100%	100%	100%		
		100%	100%	100%	0	100%		
2.1.1	1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa 2. Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	100%	12 Lap		
		100%	100%	100%	1 dok	100%		
2.1.2	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Lap		
2.1.3	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan PBJ tepat waktu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 dok	12 lap		
		100%	100%	100%	100%	100%		



2.2	1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	169% 0.8	100% 0.8		
2.2.1	1. Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik 2. Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput di SIRUP tepat waktu 3. Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/unit kerja/penyedia/pokja di lingkup provinsi kalimantan selatan	12 laporan 100% 100%	12 laporan 100% 100%	12 laporan 100% 100%	96.96% 0 100%	12 Lap 100% 100%		
2.2.2	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 aplikasi /konten	12 Lap		
2.2.3	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Lap		
2.3	1. Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ 2. Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro 3. Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	50% 0 17% 100%	57.14% 100% 18.18% 100%	66.67% 100% 30% 100%	66.66 % 0 14.29% 100%	50% 100% 17% 100%		



2.3.1	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	20 orang	25 Orang	30 orang	4 orang	20 org		
2.3.2	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dok		
2.3.3	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa 2. Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik) 3. Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	12 dokumen 55% 100%	12 dok 60% 100%	12 dok 65% 100%	100% 180 peserta 100%	12 dok 55% 100%		



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tujuan **Meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan** Sebagai perumus kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyediaan perlengkapan proses layanan pengadaan barang/jasa serta layanan pengadaan secara elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara maksimal sebagai wujud dukungan terhadap visi Kalimantan Selatan Mandiri dan Terdepan. Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan baik internal maupun eksternal organisasi.

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa didalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

- a) Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada
- b) Kurangnya kuantitas/jumlah aparatur yang memadai.
- c) Kurangnya Pemahaman terhadap kinerja teknologi informasi
- d) Peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang selalu menyesuaikan dengan kebijakan LKPP;
- e) Optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode *e-Purchasing* dan P3DN di SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemprov Kalsel;
- f) Optimalisasi pembinaan terhadap kelembagaan dan SDM UKPBJ Kabupaten/Kota se-Kalsel serta Admin SiRUP Lingkup Pemprov Kalsel.

2) Penentuan Isu-Isu Strategis

a) Kondisi Saat Ini

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih belum lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Belum terpenuhinya tenaga Fungsional Tertentu khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Belum tersedianya jaminan Jaringan dari Telkom terkait pemindahan server LPSE ke Banjarbaru;
3. Belum tersambungunya Link Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari Badan



Perencanaan dan Penganggaran;

4. Terbatasnya jumlah SDM teknis bidang LPSE;
5. Lambatnya jaringan internet yang tersedia di Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Belum terpenuhinya peremajaan/penggantian dan perangkat back-up server yang belum sesuai persyaratan teknis dari LKPP-RI serta perangkat pendukung untuk proses pengadaan barang dan jasa;
7. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode *e-Purchasing* dan P3DN pada SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemprov Kalsel;
8. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan dan SDM UKPBJ Kabupaten/Kota se-Kalsel serta Admin SiRUP Lingkup Pemprov Kalsel.

b) Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah lancarnya proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Tersedianya tenaga Fungsional Tertentu khusus Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ;
2. Tersedianya jaminan jaringan dari Telkom terkait pemindahan server LPSE ke Banjarbaru;
3. Tersambungunya Link Data Rencana Umum Pengadaan dari Badan Perencanaan dan Penganggaran;
4. Terpenuhiya jumlah SDM Teknis bidang LPSE;
5. Jaringan internet dengan kemampuan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan;
6. Terpenuhiya peremajaan/penggantian dan perangkat back-up server yang belum sesuai persyaratan teknis dari LKPP-RI serta perangkat pendukung untuk proses pengadaan barang dan jasa;
7. Optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode *e-Purchasing* dan P3DN pada SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemprov Kalsel;
8. Optimalisasi pembinaan terhadap kelembagaan dan SDM UKPBJ Kabupaten/Kota se-Kalsel serta Admin SiRUP Lingkup Pemprov Kalsel.

c) Analisis Lingkungan Strategis

Analisis Lingkungan Strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap factor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat



menentukan kondisi yang akan dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.

Prioritas factor lingkungan strategis internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

d) Analisis Lingkungan Internal

I. Kekuatan (Strengths).

- 1) Struktur Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan Potensi sebagai kekuatan.
- 2) Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersumber dari Dana APBD.
- 3) Sarana dan Prasarana Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa salah satunya adalah Bangunan Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Selatan lantai empat yang terletak di Jalan Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Kantor LPSE Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Jalan S. Parman No. 44 Banjarmasin

II. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Belum memadainya Kualitas Sumber daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dan perlu ditingkatkan keterampilannya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi informasi.
- 3) Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap peraturan peraturan terkait pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebijakan LKPP.
- 4) Belum terpenuhinya peralatan kerja untuk SDM pengadaan barang/jasa.

III. Analisis Lingkungan Eksternal.

A. Peluang (Opportunities).

- 1) DIKLAT Aparatur, dengan adanya Diklat Aparatur dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil



untuk melaksanakan Tupoksinya.

- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi Informasi dapat lebih mudah diakses karena sangat mendukung mobilitasi pelaksanaan tugas pekerjaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang membuat pekerjaan lebih mudah diolah dan dikerjakan.
- 3) Peraturan Pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan adanya Peraturan sangat mendukung pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah terutama oleh tugas – tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa

B. Tantangan/Ancaman (Threats).

- 1) Keinginan arus untuk memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa Paripurna (Center Of Excelent)
- 2) Masih adanya pola-pola yang bersifat nepotisme didalam pengadaan barang dan jasa.
- 3) Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan peraturan LKPP dan Kemendagri No.112 Tahun 2018 yang menyatakan UKPBJ dapat dibentuk secara mandiri.

IV. Asumsi Strategis.

Asumsi strategis penentuan prioritas perencanaan terhadap factor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis *Strenghts*, *Weaknesses*, *Opportunities and Threats* (SWOT Analysis), sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut :

A. Asumsi Strategis *Strenghts-Opportunities* (SO).

- 1) Optimalkan kualitas Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pencapaian kinerja dapat lebih maksimal, lebih efektif dan lebih efisien.
- 2) Optimalkan ketersediaan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa/ jabatan fungsional tertentu dalam mendukung tugas – tugas pengelolaan barang dan jasa.
- 3) Optimalkan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja dan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kinerja aparatur.



B. Asumsi Strategis *Strenghts-Threats* (ST).

- 1) Manfaatkan kebijakan dan upaya pimpinan dalam mengkoordinasikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih professional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Manfaatkan kebijakan dan upaya pimpinan dalam mengkoordinasikan peningkatan ketersediaan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dengan mengangkat jabatan fungsional tertentu dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan barang dan jasa.
- 3) Manfaatkan sarana dan prasarana kerja dengan baik agar kinerja aparatur dapat lebih meningkat.
- 4) Manfaatkan perkembangan teknologi dalam pengadaan barang/jasa.

C. Asumsi Strategis *Weaknesses-Opportunities* (WO).

- 1) Tingkatkan pemahaman atas upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih profesional.
- 2) Tingkatkan profesionalitas aparatur untuk dipromosikan dalam jabatan fungsional tertentu dengan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
- 3) Tingkatkan sarana dan prasarana, teknologi kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan pengembangan penerapan akuntabilitas kinerja bagi seluruh Pegawai.

D. Asumsi Strategis *Weaknesses -Threats* (WT).

- 1) Tingkatkan pemahaman atas upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil untuk mengantisipasi adanya aparatur yang masih kurang terampil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Tingkatkan pembinaan untuk dipromosikan dalam jabatan fungsional tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kurangnya tenaga pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.
- 3) Tingkatkan kualitas dan kuantitas dalam perkembangan teknnologi kerja serta sarana prasarana kerja guna mengantisipasi adanya kekurangan sarana dan prasarana penunjang tugas dan pekerjaan yang



lebih meningkat.

V. Prioritas Asumsi Strategis.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a) Optimalkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
- b) Optimalkan tenaga analis jabatan, dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya good governance dan clean government.
- c) Manfaatkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d) Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Faktor Kunci Keberhasilan.

Faktor kunci keberhasilan atau critical succes factors merupakan capaian kongkret



dari prioritas asumsi strategis yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada tataran implementasi operasional, aspek-aspek faktor kunci keberhasilan tersebut substansinya dirinci lebih lanjut di dalam tujuan, sasaran, dan strategi sesuai dengan perubahan-perubahan kebijakan internal maupun eksternal.

Faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan Lembaga Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
- 2) Penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi melibatkan tenaga analis, staf teknis dan administrasi.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Pemanfaatan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peningkatan koordinasi pelaksanaan program pendayagunaan aparatur di seluruh Perangkat Daerah Provinsi dengan didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana kerja (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer dll).



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2023 adalah **“Terwujudnya peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”**. Yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
2. Meningkatnya Kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan melaksanakan 2 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebanyak 16 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 4.616.520.619**, kemudian ada perubahan alokasi anggaran sehingga ada penambahan anggaran sebesar **Rp. 1.719.101.300,-** sehingga Pagu Anggaran Tahun 2023 menjadi **Rp. 6.335.621.919-** Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Sebagai Tabel 3.2 Berikut :



Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

KODE	Usulan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan	Rencana 2023					Catatan Penting	Rencana Perubahan 2023		
		Indikator Kinerja	Lokasi	Targer Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALSEL				4.616.520.619				6.335.621.919	1.719.101.300
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.717.621.800				2.494.807.800	777.186.000
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.795.000				6.795.000	-
4.01.01.1.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru; Kota Banjarmasin	12 Dokumen	6.795.000	PAD		12 Dokumen	6.795.000	-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.818.900				7.818.900	-
4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Realisasi Anggaran	Kota Banjarbaru; Kota Banjarmasin	12 Dokumen	7.818.900	PAD		12 Dokumen	7.818.900	-
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.400.000				32.400.000	-
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banjarbaru; Kota Banjarmasin	120 Lembar	32.400.000	PAD		120 Lembar	32.400.000	-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				311.807.900				383.993.900	72.186.000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten/Kota se-Kalsel	752 Liter	11.513.000	PAD	Peningkatan volume pemakaian kendaraan dinas	1.052 Liter	16.988.000	5.475.000
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	300.294.900	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ	12 Dokumen	367.005.900	66.711.000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16.000.000				721.000.000	705.000.000
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Banjarbaru; Kota Banjarmasin	1 Unit	16.000.000	PAD	Hasil temuan BPK-RI dan arahan dari Bapak Sekda	37 Unit	721.000.000	705.000.000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.342.800.000				1.342.800.000	-
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banjarbaru; Kota Banjarmasin	12 Bulan	1.342.800.000	PAD		12 Bulan	1.342.800.000	-



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN 2023)

4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2.898.898.819				3.840.814.119	941.915.300
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				679.609.700				896.694.700	217.085.000
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	253.487.500	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ	12 Dokumen	281.255.500	27.768.000
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	219.961.000	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ dan optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing	12 Dokumen	350.450.000	130.489.000
4.01.07.1.02.01	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	206.161.200	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ dan optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing	12 Dokumen	264.989.200	58.828.000
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				959.199.100				1.259.249.100	300.050.000
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	329.060.000	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ	12 Dokumen	429.749.000	100.689.000
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	355.796.100	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ	12 Dokumen	436.668.100	80.872.000
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	274.343.000	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi UKPBJ	12 Dokumen	392.832.000	118.489.000
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1.260.090.019				1.684.870.319	424.780.300
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Banjarbaru	35 Orang	566.522.200	PAD	Peningkatan kompetensi SDM	55 Orang	747.318.200	180.796.000
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	285.254.700	PAD	Perjadin dlm rangka menghadiri und/koordinasi dan pembinaan UKPBJ	12 Dokumen	365.089.000	79.834.300
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota se-Kalsel	12 Dokumen	408.313.119	PAD	Asistensi/Pembinaan Admin SIRUP	12 Dokumen	572.463.119	164.150.000



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 tentunya merupakan hal penting yang harus dibuat untuk memenuhi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk itu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membuat Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 sebagai Acuan dalam pelaksanaan kerja agar memenuhi sasaran dari Rencana Kerja. Sebagai Rancangan Perubahan Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat dijadikan Acuan Penyusunan Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam bentuk DPA di Tahun 2023 dan dapat menjawab target yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai/SDM yang ada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada.